

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan:

- a. Kebijakan pembangunan kakao pada Pemprov Sumbar dalam RPJP dan RPJM 2010-2015 memprioritaskan produktifitas dan mutu. Pemkab Padang Pariaman dalam RPJP dan RPJM 2010-2015 memprioritaskan aspek produksi, produktivitas dan mutu
- b. Rencana dan implementasi tentang pembangunan kakao di Sumatera Barat tidak konsisten. Pemrov Sumatera Barat melakukan revisi terhadap kebijakan pembangunan kakao pada tahun 2014 berupa perubahan tujuan dan target. Pemrov Sumbar dengan revisi ini, memfokuskan pada upaya mengejar produksi. Delapan program peningkatan produksi kakao dari Pemprov Sumbar dengan pengelolaan Dinas Perkebunan Sumbar; mengalokasikan anggaran sebanyak Rp.6,97 miliar (40,92 persen) dari total anggaran untuk pembangunan perkebunan sebesar Rp.17,031. Pemkab Padang Pariaman mengalami implementasi kebijakan yang berbeda dengan perencanaan dimana target yang dapat dilaksanakan hanya yang berkaitan meningkatkan jumlah petani yang menanam kakao. Upaya peningkatan produksi dilakukan dengan program Gernas dan mengalokasikan peningkatan anggaran rentang tahun 2012-2014.
- c. Implementasi kebijakan tentang peningkatan produksi dan mutu kakao telah dilaksanakan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dan pelatihan, namun petani belum dapat menyerap dan menerapkan sepenuhnya
- d. Faktor pendorong kebijakan publik berbasis kakao berupa apresiasi masyarakat dan dukungan pemerintah pusat melalui gerakan nasional kakao. Faktor kendala berasal dari internal petani, batasan jangka waktu dan pendanaan program

B. Saran

Penelitian berikut perlu dilakukan untuk menggali efektifitas implementasi pembangunan secara anggaran dan pendekatan terhadap masyarakat dalam delapan program di Provinsi Sumatera Barat dan program Gernas kakao.

